



PENGARUH KEPEMILIKAN PERUSAHAAN TERHADAP PENETAPAN BIAYA AUDIT

Aulia Rachma Hanifah, Agustinus Santosa Adiwibowo¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of management ownership structure, foreign ownership, and Government Ownership Foreign Ownership as an independent variable on audit fees as the dependent variable on companies listed on the Indonesia Stock Exchange LQ45. The population used in this study were 34 companies listed on the Indonesia Stock Exchange LQ45 (IDX) during the 2016-2018 period in a row. The sample used was as many as 27 companies using purposive sampling techniques with the criteria of having an annual report and financial statements during the study period. Analysis of research conducted using multiple linear regression analysis by first passing the classical assumption test and using the t test, F test, and the coefficient of determination (R²) to determine the significance and influence of management ownership, foreign ownership, and Government Ownership Foreign ownership of costs an audit. The results of this study indicate that there is a significant positive effect on the variable foreign ownership of audit fees. Managerial and government ownership does not have a significant negative effect on audit fees. Overall, the ownership structure has a different effect on audit fees.

Keywords: ownership structure, audit fees, managerial ownership, foreign ownership, government ownership.

PENDAHULUAN

Perhatian terhadap isu mengenai tata kelola perusahaan meningkat secara signifikan sejak adanya beberapa kasus kegagalan di beberapa perusahaan. Munculnya isu-isu tersebut dikarenakan buruknya pengelolaan perusahaan. Beberapa negara di Asia termasuk Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang memburuk dikarenakan lemahnya implementasi tata kelola perusahaan. Dilihat dari sisi permintaan, mekanisme tata kelola membutuhkan audit berkualitas tinggi untuk mengurangi biaya agensi dan kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang menyebabkan tingginya biaya audit. Sedangkan dilihat dari sisi penawaran, tata kelola dimaksudkan untuk menurunkan masalah keagenan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan menurunkan resiko salah saji material, sehingga manajemen bisa lebih cermat dalam rangka mempersiapkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan memenuhi ketentuan yang ada. Jika manajemen melakukan ini dengan baik dapat mengurangi cakupan audit dan juga bisa menurunkan biaya audit.

¹ *Corresponding author*

Kegagalan dan skandal tata kelola perusahaan akhir-akhir ini mulai mengawasi dan mengamati peran penting eksternal audit dalam mempromosikan bagaimana pengelolaan perusahaan dengan baik. Pemisahan kepemilikan dan pengawasan disarankan oleh teori agensi untuk menghindari konflik kepentingan manajer dikarenakan adanya pemantauan yang kurang ketat terhadap keputusan manajer, pemegang saham cenderung membayar biaya pemantauan. Di negara berkembang, masalah keagenan ini bahkan lebih penting karena adanya kesulitan dalam mengurangi dan menangani konflik antar pemegang sahamnya dengan menggunakan mekanisme kontrol korporat internal (Fan & Wong, 2005) sehingga audit ini sangat dibutuhkan.

Upaya mengurangi asimetri informasi dan beberapa masalah keagenan dapat dilakukan dengan audit yang dianggap sebagai salah satu bentuk tata kelola yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan. (Beasley, Elder, & Arens, 2011). Manfaat dari Audit eksternal yang lain adalah dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang didasarkan pada kualitas layanan audit yang oleh auditor eksternal. Total biaya audit dianggap sebagai imbalan atas jasa audit yang harus dibayarkan oleh perusahaan, dianggap sebagai pengukuran kualitas audit. (Hallak & Silva, 2012).

Sebagai ahli keuangan, seorang auditor harus melakukan proses audit yang terbaik dengan hasil yang terbaik untuk meyakinkan para pengguna laporan keuangan. Kualitas audit yang terbaik sangat bergantung pada kinerja auditor. Pengguna laporan keuangan pada umumnya rela membayar biaya audit yang lebih tinggi jika para auditor dapat menghasilkan audit berkualitas tinggi.

Beberapa studi sebelumnya mengenai seberapa besar audit fee yang dibayarkan terhadap auditor eksternal atas jasanya bervariasi yang didasarkan pada struktur kepemilikan dari klien tersebut (Adelopo dkk, 2012; Khan dkk, 2011; Mitra dkk, 2007). Hasil tersebut muncul karena perbedaan kepemilikan memungkinkan adanya mekanisme kontrol perusahaan yang digunakan *shareholders* untuk memonitor kegiatan bisnis termasuk dalam proses penyusunan laporan keuangannya juga.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nelson & Mohamed-Rusdi (2015) terhadap perusahaan dengan kepemilikan manajerial, pemerintah, dan asing yang tercantum dalam daftar Bursa Efek Malaysia. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing berpengaruh positif. Hasil positif tersebut juga ditunjukkan pada variabel kepemilikan pemerintah pada biaya audit yang dibayarkan kepada auditor independen dan hasil pengaruh negatif ditunjukkan pada kepemilikan manajerial yang tidak adanya hubungan dengan biaya audit. Penelitian oleh Nelson dan Mohamed-Rusdi (2015) menunjukkan hasil yang konsisten dengan hasil yang diperoleh Wahab, Zain, dan James (2011), yang juga menemukan tidak adanya hubungan antara biaya audit dan kepemilikan manajerial. Manajer dengan kepemilikan tinggi cenderung melakukan manajemen oportunistik untuk keuntungan jangka pendek dan akan lebih mau menghasilkan laporan keuangan yang berharga. Bliss, Gul, & Majid, 2011 menyatakan bahwa beberapa perusahaan dengan tingkat kepemilikan saham manajerial cukup tinggi masih kurang dalam perlakuannya terhadap manajemen laba. Risiko salah saji material dan biaya audit dapat berkurang dikarenakan adanya peningkatan kepemilikan pada manajemen, sehingga dapat pula menyebabkan hilangnya tindakan oportunistik ini.

Tujuan dari penelitian ini meneliti pengaruh yang ada pada struktur kepemilikan terhadap hubungannya dengan biaya audit pada entitas yang tercantum dalam daftar indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018



KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Praktik audit tidak bisa dipisahkan dari teori keagenan dan tata kelola perusahaan. Dalam teori agensi, prinsipal atau agen tidak mungkin berjalan dengan tanpa biaya apapun untuk memastikan adanya keputusan optimal sehingga, sebagian besar hubungan prinsipal dan agen akan muncul biaya pemantauan yang disebut biaya agensi atau *agency cost*. Biaya agensi dibagi menjadi 3 menurut Company et al. (1976), yaitu biaya monitoring, biaya bonding, dan biaya residual. Biaya monitoring adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi, mengukur, dan mengontrol aktivitas agen, sedangkan biaya bonding merupakan biaya yang ditanggung oleh manajemen (agen) dalam upaya memenuhi kepentingan prinsipal untuk menjalankan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya, dan biaya residual adalah biaya yang muncul karena menurunnya kesejahteraan prinsipal sebagai akibat dari adanya perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal. Biaya agensi muncul dikarenakan adanya masalah agensi yang biasanya muncul ketika adanya tujuan atau keinginan yang bertentangan (*conflict of interest*) dan juga asimetri informasi yang terjadi ketika salah satu pihak (agen) mengetahui informasi yang relevan, sementara pihak kedua (prinsipal) tidak mengetahui sehingga terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang diinginkan. Teori agensi telah menjadi teori yang mulai mencuri perhatian akhir-akhir ini dalam penelitian yang ada hubungannya dengan audit. Berdasarkan penelitian sebelumnya, teori keagenan merupakan teori yang dapat dikaitkan dengan hubungan struktur kepemilikan dan pengaruhnya pada biaya agensi. Biaya agensi tersebut adalah biaya audit. Mekanisme tata kelola perusahaan diharapkan dapat membantu meningkatkan pemantauan manajemen perusahaan dan salah saji dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Tata kelola berfokus pada sistem pertanggungjawaban keuangan, terutama tanggungjawabnya terhadap publik. Prinsip dasar yang terkandung dalam tata kelola perusahaan yang baik, meliputi transparansi atau keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan serta kewajaran. Tata kelola perusahaan dianggap sebagai pondasi untuk proses pelaporan keuangan suatu perusahaan, dimana tata kelola perusahaan dapat menentukan distribusi hak dan tanggung jawab pengelolaan organisasi. Tata kelola perusahaan dapat mengantur hak dan tanggung jawab manajemen, auditor eksternal, dan pemegang saham (Norwani, Mohamad, & Check, 2011). Tata kelola perusahaan juga dianggap dapat memberi arahan untuk pengelolaan bisnis dalam upaya meningkatkan kekayaan pemegang sahamnya (Mustapha & Ahmad, 2011). Kepemilikan perusahaan yang berbeda-beda menyebabkan masalah pada keandalan pelaporan keuangan karena kurangnya pemantauan kegiatan perusahaan oleh pemegang saham (Mitra, dkk., 2007).

Hubungan Struktur kepemilikan dan perusahaan didasarkan atas konsep fiduciary duty, yang diartikan sebagai seseorang yang memegang amanah atas dasar kepercayaan untuk kepentingan pihak lain (Daniri, 2014). Direksi perusahaan diharuskan untuk menerapkan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam melakukan tindakan demi kepentingan perusahaan, keputusan dan tindakan yang diambil harus sesuai untuk melaksanakan tugas fidusianya. Kerangka tata kelola perusahaan memproteksi dan memfasilitasi hak pemegang saham. Hak pemegang saham antara lain hak berpartisipasi dan diberi informasi yang cukup mengenai keputusan yang ada didalam perusahaan. Dalam penelitian ini struktur kepemilikan atau pemegang saham mendapatkan fasilitasnya berupa tindakan dalam kapasitas fidusia dengan berupa pengungkapan tata kelola perusahaan. Perusahaan harus dapat memastikan bahwa semua

struktur kepemilikan dapat diperlakukan dengan adil. Struktur kepemilikan perusahaan telah menjadi subyek perdebatan penting dalam hal keuangan perusahaan dan literatur akuntansi karena struktur kepemilikan merupakan elemen dari tata kelola perusahaan yang dapat memberikan dampak bagi operasional perusahaan. Mitra et al., (2007) melakukan penelitian mengenai hubungan kepemilikan antara perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi dengan biaya audit yang harus dibayarkan perusahaan kepada auditor eksternal. Yatim et al. (2006) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan mungkin dapat menjadi variabel yang sesuai untuk menjelaskan hubungan antara tata kelola perusahaan dan biaya audit, dibandingkan dengan variabel tata kelola perusahaan lainnya. Struktur kepemilikan suatu perusahaan menentukan tingkat pemantauan dan dampak pada tingkat risiko perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Biaya Audit

Kepemilikan manajerial dianggap dapat menekan masalah agensi melalui pengurangan biaya agensi melalui pemisahan manajemen dan kepemilikan perusahaan. Biaya agensi timbul dari pengambilalihan langsung dana oleh para manajer. Manajer didorong untuk mempunyai saham dalam upaya meningkatkan motivasi pemantauan dalam manajemen. Jika porsi kepemilikan saham manajer semakin tinggi, maka tanggung jawab manajer untuk meningkatkan nilai perusahaan semakin besar sehingga manajer bisa memperoleh rewards yang lebih tinggi pula. Menurut Mustapha & Ahmad (2011), semakin tinggi kepemilikan manajemen, maka konflik akan semakin sedikit, sehingga masalah agensi yang timbul serta biaya agensi juga semakin berkurang dikarenakan manajemen memiliki insentif untuk melakukan proteksi terhadap kepentingan saham yang membutuhkan lebih sedikit pengawasan oleh dewan, aktivitas dewan dianggap upaya alternatif pemantauan yang membutuhkan banyak biaya.

Penelitian O'Sullivan (2000) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yang signifikan dapat mengakibatkan menurunnya kebutuhan audit secara intensif dikarenakan adanya fungsi gabungan kepemilikan dan manajemen. Akibat dari penggabungan tersebut adalah adanya minimnya motivasi pemantauan untuk audit sehingga auditor juga cenderung kurang dalam melakukan uji tambahan pada saat audit, karena manajer cenderung sengaja memperdaya diri mereka dengan memaksimalkan keputusan mengenai struktur modal karena tingginya kepemilikan saham mereka. Dengan demikian hipotesis yang diajukan :

H1 : Kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan biaya audit

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Biaya Audit

Biaya audit akan naik untuk anak perusahaan milik asing atau kepemilikan asing karena adanya kompleksitas pelaporan keuangan tambahan dan adanya pemisahan geografis. Penyusunan laporan keuangan perusahaan dengan kepemilikan asing akan lebih rumit ketika perusahaan induk tersebut berlokasi di negara lain karena aturan akunting di setiap negara akan berbeda. Penentuan biaya audit dalam beberapa literatur sebelumnya menyebutkan bahwa peningkatan kompleksitas dapat menyebabkan biaya audit meningkat. Menurut Niemi (2005), perusahaan dengan kepemilikan asing memerlukan kontrol manajemen lebih banyak karena adanya pemisahan pemilik dan manajemen perusahaan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan diantara mereka. Manajer perusahaan akan cenderung untuk memenuhi kepentingan anak perusahaan daripada memenuhi kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Biaya audit dalam kepemilikan asing juga meningkat karena investor asing menuntut audit yang berkualitas tinggi (Mohammad Zureigat, 2011). Audit dengan kualitas yang tinggi membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mendapatkan audit yang lebih rinci.

H2 : Kepemilikan asing berhubungan positif dengan biaya audit



Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Biaya Audit

Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah memiliki perbedaan dengan perusahaan pada umumnya karena operasional perusahaan dibiayai sepenuhnya oleh uang yang berhubungan dengan seluruh warga negara di negara tersebut sehingga kepemilikannya sangat tersebar. Manajemen perusahaan dalam perusahaan dengan kepemilikan pemerintah kurang terpantau dikarenakan pemegang saham tidak memiliki insentif kuat dalam pemantauan. Kurangnya insentif dalam hal pemantauan disebabkan karena setiap pemegang saham di perusahaan hanya memiliki inventasi kecil. Hak kontrol perusahaan dengan kepemilikan pemerintah berada di tangan individu-individu yang ada dalam pemerintah. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah tidak menanggung biaya apapun, termasuk biaya pengendalian sehingga dapat menyebabkan sistem kontrol internal perusahaan rendah. Masalah keagenan dapat meningkat karena lemahnya kontrol internal sehingga auditor eksternal dibutuhkan untuk memantau kinerja dan operasional perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Chan, Ezzamel, & Gwilliam (1993), menyatakan bahwa pemegang saham dalam perusahaan dengan kepemilikan yang tersebar luas dapat melakukan audit sebagai cara untuk memonitor perilaku manajerial.

H3 : Kepemilikan pemerintah berhubungan positif dengan biaya audit

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel biaya audit adalah jumlah biaya audit yang dikenakan kepada klien oleh auditor eksternal yang akan dilambangkan dengan AFEE. Kepemilikan manajerial pada penelitian ini berdasarkan total persentase kepemilikan yang dimiliki oleh jajaran eksekutif ataupun setaranya baik kepemilikan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Kepemilikan asing pada penelitian ini akan dilambangkan dengan FOWN. Pengukuran operasionalnya dengan melihat persentase kepemilikan yang dimiliki oleh individu asing atau non individu. Individu asing dapat didefinisikan sebagai warga negara asing dan non individu adalah perusahaan atau organisasi asing.

Kepemilikan asing pada penelitian ini akan dilambangkan dengan GOWN. Pengukuran kepemilikan pemerintah dengan melihat besarnya persentase saham yang dimiliki oleh pemerintah. Kompleksitas perusahaan dalam penelitian ini akan tetap menggunakan rasio persediaan dan piutang terhadap total aset yang akan dilambangkan dengan INVREC. Leverage menggunakan nilai total hutang terhadap total aset seperti penelitian sebelumnya yang akan dilambangkan dengan LEV. Profitabilitas akan diukur menggunakan ROA dengan menghitung jumlah laba perusahaan sebelum pajak dibagi total aset yang akan dilambangkan dengan ROA. Risiko perusahaan diukur menggunakan rasio lancar dengan menghitung rasio aset lancar dan liabilitas terhadap total aset yang akan dilambangkan dengan CRATIO.

Penentuan Sampel

Sampel diambil dari perusahaan yang tercatat dalam LQ45 atau indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari 45 perusahaan pada tiap periodenya dengan nilai kapitalisasi tertinggi dalam 1-2 bulan terakhir dan nilai transaksi tertinggi di pasar regular dalam kurun waktu 12 bulan. Peneliti menggunakan data LQ45 periode 2016-2018. Metode pengambilan data pada penelitian diambil menggunakan purposive sampling sesuai dengan kriteria yang ada. Kriteria pada penelitian ini adalah :

1. Perusahaan yang tercantum dalam LQ45 selama Februari 2016 hingga Januari 2019.
2. Perusahaan yang telah mengeluarkan laporan tahunan pada tahun 2016-2018.
3. Perusahaan yang mengungkapkan data secara lengkap pada laporan tahunan dan laporan keuangan terkait variabel yang digunakan.
4. Perusahaan yang menggunakan currency rupiah.

5. Perusahaan yang konsisten tercantum daftar LQ 45 kurun waktu 3 tahun berturut-turut.
6. Perusahaan yang mengungkapkan data-data yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel dalam penelitian ini.

Metode Analisis

Metode analisis dan pengujian data yang digunakan antara lain statistik deskriptif dan uji regresi linear berganda. Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah :

$$LNAFE = \beta_0 + \beta_1 (MOWN) + \beta_2 (FOWN) + \beta_3 (GOWN) + \beta_4 (LEV) + \beta_5 (INVRE) + \beta_6 (CRATIO) + \beta_7 (ROA) + \varepsilon$$

Keterangan :

LNAFEE	= Total biaya audit yang dikeluarkan perusahaan (logaritma natural dari audit fee)
$\beta_1 (MOWN)$	= kepemilikan manajerial
$\beta_2 (FOWN)$	= kepemilikan asing
$\beta_3 (GOWN)$	= kepemilikan pemerintah
$\beta_4 (LEV)$	= leverage (nilai hutang terhadap aset)
$\beta_5 (INVRE)$	= <i>Inventory receivable</i> (Jumlah kewajiban dibagi dengan total asset)
$\beta_6 (CRATIO)$	= <i>Current Ratio</i> (Rasio aset lancar dengan liabilitas lancar terhadap total aset).
$\beta_7 (ROA)$	= <i>Return on assets</i> (Jumlah laba perusahaan sebelum pajak dibagi total asset)
ε	= <i>error term</i>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Tabel 1
Deskripsi Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan Indonesia yang tercantum di dalam LQ45 Bursa Efek Indonesia selama 2016-2018	270
2	Perusahaan yang selama 3 tahun berturut-turut stabil berada di LQ45	204
3	Perusahaan yang tidak mengungkapkan biaya audit eksternal dalam laporan tahunan pada 2016-2018	(48)
4	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data di laporan tahunan selama tahun 2016-2018	(75)
Perusahaan yang terpilih menjadi sampel		81

Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa populasi penelitian adalah berjumlah 81 perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 selama tahun 2016-2018. Menurut kriteria yang telah ditentukan dalam metode purposive sampling, ditunjukkan bahwa ada beberapa perusahaan tidak mengungkapkan fee audit dan beberapa kriteria yang telah ditetapkan antara lain struktur kepemilikan, *current ratio*, *leverage*, *return on assets*, dan *inventory receivables*.



Deskripsi Variabel

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AUDIT FEE	81	510000000.00 000000	49245000000. 00000000	6453005738.2 716040000	10723037170. 88770500000
MOWN	81	0.00%	1.87%	0.0940%	0.33161%
FOWN	81	0.00%	94.18%	36.6294%	29.93750%
GOWN	81	0.00%	70.00%	27.5499%	29.76421%
LEV	81	.30000000000 0000	12.480000000 000000	3.4312608051 71875	2.5659906951 99828
ROA	81	-0.69%	46.44%	7.9641%	10.07147%
C.RATIO	81	.27964366813 7205	5.7200000000 00000	1.9729904339 09346	1.3538879010 37753
INVREC	81	.047	.765	.30022	.201058
Valid N (listwise)					

Sepanjang tahun 2016 hingga 2018, biaya audit (AFEE) tertinggi sebesar Rp 49.245.000.000,00 dibayarkan oleh perusahaan Telekomunikasi Indonesia (TLKM) atas audit laporan keuangan termasuk didalamnya pajak pertambahan nilai pada tahun 2018. Sedangkan biaya audit terendah Rp 510.000.000,00 yang dibayarkan oleh perusahaan Bumi Serpong Damai (BSDE) pada 2016. Selanjutnya, audit fee (AFEE) memiliki rata-rata sebesar Rp 6.453.005.738,27 dengan standar deviasi 10.723.037.170.88 yang artinya dari total sampel 81 perusahaan, rata-rata biaya audit yang disepakati antara auditor eksternal dan klien adalah sekitar Rp 6.45 milyar. Hasil penelitian pada kepemilikan saham perusahaan menunjukkan bahwa rata-rata persentase saham yang dimiliki oleh manajemen adalah sebesar 0,094%, sedangkan saham yang dimiliki oleh investor asing baik individual, perusahaan, maupun kelompok memiliki rata-rata sebesar 36.629%, dan rata-rata kepemilikan saham oleh pemerintah pusat sebesar 27,549%.

Leverage (LEV) memiliki nilai minimum 0,30 dan nilai maksimum sebesar 12,48 dengan standar deviasi 2,57. Rata-rata LEV adalah 3,43 yang berarti bahwa perusahaan-perusahaan pada tahun 2015 rata-rata memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluaran tetap terhadap total aset sebesar 0,3%. Rata-rata ROA perusahaan selama 2016-2018 menunjukkan nilai sebesar 7.96% dengan nilai standar deviasi sebesar 10.07%. Perusahaan dengan profitabilitas tertinggi sebesar 46.44% sedangkan nilai minimum berada pada -0.69% yang berarti bahwa terdapat perusahaan yang mengalami kerugian sebesar angka tersebut selama tahun 2016 hingga 2018. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai minimum CRATIO sebesar 0,28 dan nilai maksimum sebesar 5,72. Rata-rata rasio lancar perusahaan-perusahaan selama tahun 2016-2018 sebesar 1,97 dengan menunjukkan standar deviasi sebesar 1,35. Nilai minimum kompleksitas menunjukkan nilai 0,04 dan nilai maksimum sebesar 0,76. Standar deviasi dengan nilai 0,20 menunjukkan sebaran data variabel kompleksitas adalah 0,20 dari rata-ratanya, dimana rata-rata dari variabel kompleksitas menunjukkan nilai 0,30.

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis

Coefficientsa						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.947	.199		39.928	.000
	LAG_MOWN	.283	.285	.106	.991	.325
	LAG_FOWN	.019	.004	.508	4.326	.000
	LAG_GOWN	.004	.006	.111	.699	.487
	LAG_LEV	-.065	.077	-.119	-.841	.403
	LAG_ROA	-.017	.013	-.176	-1.265	.210
	LAG_C.RATIO	-.207	.098	-.286	-2.109	.038
	LAG_INVREC	-.198	.801	-.031	-.247	.806

a. Dependent Variable: LAG_LNAUDITFEE

Kepemilikan manajerial merupakan representasi hipotesis pertama (H1) yang menjelaskan hubungan antara struktur kepemilikan manajerial dengan biaya audit. Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan biaya audit. Berdasarkan uji t yang telah dilakukan, nilai signifikan variabel LAG_MOWN terhadap LAG_LNAUDITFEE adalah sebesar 0,325 dengan nilai koefisien 0,283 dan nilai t hitung adalah 0,991. Nilai signifikan 0,325 > 0,05 dan nilai t hitung 0,991 < 1,99394. Nilai t hitung < t kritis sehingga hipotesis ditolak. Hasil penelitian didukung dengan hasil penelitian Nelson & Mohamed-Rusdi (2015) dan Wahab et al., (2011). Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan tidak signifikan antara kepemilikan manajerial dengan biaya audit.

Kepemilikan asing merupakan variabel independen pada hipotesis kedua (H2) yang menerangkan hubungan antara struktur kepemilikan asing dengan biaya audit. Hipotesis sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan asing berhubungan positif dengan biaya audit. Nilai signifikan untuk melihat pengaruh variabel LAG_FOWN terhadap LAG_LNAUDITFEE adalah sebesar 0,000 dan nilai t hitung adalah sebesar 4,326. Nilai signifikan 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 4,326 > 1,99394. . Nilai t hitung < t kritis sehingga hipotesis diterima. Tuntutan dari entitas terhadap auditor serta kompleksitas bisnis dapat menyebabkan biaya audit yang tinggi. Perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi cenderung menggunakan jasa BIG4 (Mohammad Zureigat, 2011) dan prosedur audit dalam perusahaan asing biasanya membutuhkan waktu yang panjang sehingga biaya audit yang ditetapkan cenderung tinggi (Niemi, 2005). Hasil ini selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya antara lain Nelson & Mohamed-Rusdi (2015) dan Niemi (2005) dimana hasil menunjukkan adanya hubungan positif signifikan kepemilikan asing dan biaya audit.

Kepemilikan pemerintah adalah variabel untuk hipotesis ketiga (H3) yang menjelaskan hubungan antara struktur kepemilikan pemerintah dengan biaya audit. Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berhubungan positif dengan biaya audit. Nilai signifikan untuk melihat pengaruh variabel LAG_GOWN terhadap LAG_LNAUDITFEE adalah

sebesar 0,487 dan nilai t hitung adalah sebesar 0,699. Nilai signifikan $0,487 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,699 < 1,99394$. Nilai t hitung $< t$ kritis maka hipotesis ditolak. Hipotesis menyatakan kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap biaya audit. Sementara dari hasil uji yang ada bahwa hipotesis ditolak yang selaras dengan penelitian Ben Ali & Lesage (2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah dapat dikenakan biaya audit yang rendah dikarenakan kepemilikan saham negara yang tinggi merupakan bentuk sinyal kepercayaan pemerintah terhadap perusahaan untuk mengurangi konflik keagenan serta kepemilikan pemerintah merupakan bentuk dari perlindungan pemegang saham dalam menghindari pengambilalihan minoritas. Pemerintah sebagai pemegang saham ketika perusahaan tersebut diprivatisasi sebagian, maka pemerintah menganggap bahwa pasar memberi kepercayaan kepada pemerintah sehingga pasar tidak mengambil alih saham perusahaan. Keadaan tersebut dapat mengurangi ruang lingkup audit sehingga secara negatif mempengaruhi biaya audit.

Hasil penelitian pada variabel kontrol yang pertama adalah leverage klien. Hasil menunjukkan bahwa leverage klien tidak mempunyai pengaruh terhadap biaya audit dikarenakan adanya hasil yang tidak signifikan. Variabel kontrol yang kedua adalah return on assets (ROA) dengan menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara variabel ROA dengan biaya audit. Variabel kontrol yang ketiga adalah current ratio. Hasil menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan antara current ratio dan biaya audit. Variabel kontrol terakhir adalah kompleksitas perusahaan yang dihitung dengan menggunakan rasio persediaan dan piutang terhadap total asset (INVREC) dan hasil menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara INVREC dan biaya audit.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Variabel kepemilikan manajerial (MOWN) menunjukkan hasil tidak signifikan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien 0,283 dan tingkat signifikansi sebesar 0,325. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya audit yang disepakati tidak ditentukan oleh tingkat kepemilikan saham manajerial dalam suatu perusahaan. Hipotesis pertama ditolak. Variabel kepemilikan asing (FOWN) dengan tingkat biaya audit memiliki hubungan signifikan berpengaruh. Biaya audit yang disepakati dipengaruhi oleh tingkat tinggi rendahnya kepemilikan asing. Hipotesis kedua diterima. Variabel kepemilikan pemerintah (GOWN) menyatakan hubungan tidak yang signifikan terhadap tingkat biaya audit. Hal ini berarti perusahaan milik pemerintah cenderung membayar biaya audit pada tingkat yang lebih rendah. Hipotesis ketiga ditolak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, kurangnya perusahaan yang melakukan pengungkapan biaya audit. Hasilnya, banyak perusahaan yang belum mencantumkan biaya audit dalam laporan tahunannya. Kedua, Beberapa perusahaan menuliskan biaya audit dalam beberapa bahasa yang berbeda seperti jasa akuntan, jasa audit, jasa penunjang pasar modal, dan lain-lain. Terakhir, komposisi kepemilikan saham perusahaan tidak diungkapkan dengan aturan yang jelas. Beberapa perusahaan menuliskan bagan kepemilikan saham yang merinci sehingga informasi yang didapatkan menjadi jelas. Namun, beberapa perusahaan ada yang hanya menjabarkan pemilik saham dan publik. Sehingga, struktur kepemilikan saham akan sulit ditelusuri.

Atas adanya keterbatasan tersebut maka saran untuk penelitian selanjutnya antara lain melakukan pemisahan biaya audit yang terdiri dari biaya audit dan non-audit sehingga nominal dapat lebih menggambarkan tingkat biaya pengendali, menambahkan variabel lain pada variabel struktur kepemilikan dan pengukuran untuk masing-masing kepemilikan agar lebih rinci, menambahkan periode penelitian untuk meningkatkan terkumpulnya jumlah data penelitian.



REFERENSI

Adelopo, I., Jallow, K., & Scott, P. (2012). Multiple large ownership structure, audit committee activity and audit fees: Evidence from the UK. *Journal of Applied Accounting Research*, 13(2), 100–121. <https://doi.org/10.1108/09675421211254821>

Beasley, M. S., Elder, R. J., & Arens, A. A. (2011). *Assurance, Jasa Audit & Jakarta: Salemba Empat*.

Ben Ali, C., & Lesage, C. (2013). Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France. *China Journal of Accounting Research*, 6(1), 21–34. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.08.002>

Bliss, M. A., Gul, F. A., & Majid, A. (2011). Do political connections affect the role of independent audit committees and CEO Duality? Some evidence from Malaysian audit pricing. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 7(2), 82–98. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2011.10.002>

Chan, P., Ezzamel, M., & Gwilliam, D. (1993). Determinants of Audit Fees for Quoted UK Companies. *Journal of Business Finance & Accounting*, 20(6), 765–786. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.1993.tb00292.x>

Company, P., Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I. Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.*

Daniri, M. A. (2014). *Lead by GCG*. Gagasan Bisnis.

Fan, J. P. H., & Wong, T. J. (2005). Do external auditors perform a corporate governance role in emerging markets? Evidence from East Asia. *Journal of Accounting Research*, 43(1), 35–72. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2004.00162.x>

Hallak, R., & Silva, A. (2012). Determinants of audit and non-audit fees provided by independent auditors in Brazil. *Revista Contabilidade & Finanças*, 23(60), 223–231.

Khan, A. R., Hossain, D. M., & Siddiqui, J. (2011). Corporate ownership concentration and audit fees: The case of an emerging economy. *Advances in Accounting*, 27(1), 125–131. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2011.04.007>

Mitra, S., Hossain, M., & Deis, D. R. (2007). The empirical relationship between ownership characteristics and audit fees. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 28(3), 257–285. <https://doi.org/10.1007/s11156-006-0014-7>

Mohammad Zureigat, Q. (2011). The Effect of Ownership Structure on Audit Quality: Evidence from Jordan. *International Journal of Business and Social Science*, 2(10), 38–46.



Mustapha, M., & Ahmad, A. C. (2011). Agency theory and managerial ownership: Evidence from Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, 26(5), 419–436. <https://doi.org/10.1108/02686901111129571>

Nelson, S. P., & Mohamed-Rusdi, N. F. (2015). Ownership Structure Influence on Audit Fee. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 5(4), 457–478.

Niemi, L. (2005). Audit effort and fees under concentrated client ownership: Evidence from four international audit firms. *International Journal of Accounting*, 40(4), 303–323. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2005.09.006>

Norwani, N. M., Mohamad, Z. Z., & Check, I. T. (2011). Corporate Governance Failure and Its Impact on Financial Reporting Within Selected Companies. *International Journal of Business and Social Science*, 2(21), 205–213.

O’Sullivan, N. (2000). The impact of board composition and ownership on audit quality: Evidence from large UK companies. *British Accounting Review*, 32(4), 397–414. <https://doi.org/10.1006/bare.2000.0139>

Wahab, E. A. A., Zain, M. M., & James, K. (2011). Political connections, corporate governance and audit fees in Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, 26(5), 393–418. <https://doi.org/10.1108/02686901111129562>

Yatim, P., Kent, P., & Clarkson, P. (2006). Governance structures, ethnicity, and audit fees of Malaysian listed firms. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 21, pp. 757–782. <https://doi.org/10.1108/02686900610680530>